

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling berkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah)¹

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan. Adanya pertumbuhan dan kemajuan perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses dari pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara adalah mereka yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut menyerasikan antara nilai, kaidah dan perilaku, misalnya nilai-nilai kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, penegakan hukum

¹ I.H. Hijmans, dalam *Het recht der werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, CitraAditya Bakti, Bandung 2006, hal 208

tersebut berkisar dari menindak dan memelihara kedamaian yang bertujuan keadilan.²

Oleh karena itu hukum sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keadilan harus lebih ditingkatkan, karena tanpa ketertiban dan kepastian hukum kehidupan masyarakat yang teratur tidak mungkin terselenggara³. Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum atau sengketa, pelaksanaan atau penegakan hukum itu diserahkan pada penguasa, dalam hal ini kekuasaan kehakiman. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.⁴ Kekuasaan kehakiman pada hakekatnya adalah bebas. Tugas pokok kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan

Di Indonesia, tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara

² Soerjono Soekanto, Sendi-Sendi Ilmu Hukum. Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti, 1993), hal 35.

³ Satjipto Raharjo, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 1991), hal 23.

⁴ Pasal 1 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

yang dihadapkan kepadanya sehingga putusan itu mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila atau bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum.”⁵

Tugas pokok dari hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tampaknya sangat sederhana tugas hakim seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tetapi dalam kenyataannya tidaklah mudah dan sesederhana itu. Pada hakekatnya dari seorang hakim diharapkan memberi pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang dan benar tidaknya peristiwa yang di sengketakan dan kemudian menerapkan atau menentukan hukumnya. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut agar hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hal ini perlu dipertimbangkan karena keadaan- keadaan pribadi seseorang Perlu diperhitungkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi atau orang-orang dari lingkungannya, dokter ahli dan sebagainya.⁶

⁵ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

⁶ Satjipto Raharjo, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, hal 38

Narkotika adalah zat yang berkhasiat dan sangat dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia, terutama dari sudut medis. Namun disisi lain, justru sifat dan khasiat yang berharga dalam dunia pengobatan menimbulkan efek lain yang dapat disalahgunakan orang untuk memakainya secara terus menerus dan diluar ketentuan undang-undang serta kepentingan pengobatan, yakni penyalahgunaan beserta berbagai akibatnya. Maka masalah utama narkotika adalah di suatu pihak diperlukan (untuk medis dan ilmu pengetahuan) di pihak lain harus diberantas karena disalahgunakan

Sementara itu ada orang-orang atau organisasi-organisasi ilegal yang bergerak di bidang peredaran gelap narkotika dengan berbagai motivasi dari sekedar mencari nafkah, mengeruk uang sebanyak-banyaknya sampai pada tujuan subversi untuk melumpuhkan suatu Negara.⁷ Penyalahgunaan narkotika sangatlah berbahaya, karena disamping akan membawa pengaruh terhadap diri pemakainya dimana ia akan kecanduan dan hidupnya tergantung pada zat-zat narkotika, jika tidak tercegah (terobati), maka narkotika yang digunakan akan semakin kuat dan bertambah dosisnya.

Penyalahgunaan narkotika atau istilah lainnya penyalahgunaan obat (*drug Abuse*) dalam dua tiga dekade terakhir sangat memprihatinkan. Secara global dan sudah mencapai keadaan serius di Indonesia. Penyalahgunaan dimaksud bila suatu obat digunakan dengan sengaja untuk mencari atau mencapai kesadaran tertentu karena pengaruh obat pada jiwa. Dari segi hukum obat-obat yang sering disalahgunakan dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu

⁷ Soedjono Drdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990) hal 55

narkotika atau obat bius dan psikotropika termasuk obat daftar G jenis carnopen. Pada hakekatnya masalah penyalahgunaan narkotika bukan masalah yang berdiri sendiri. Melainkan mempunyai sangkut paut dengan faktor-faktor lain yang timbul dalam kehidupan manusia. Penyalahgunaan dan peredaran obat-obat keras daftar G ini sedang marak terjadi. Menurut isu yang beredar akhir-akhir ini bahwa para pelaku tindak kriminal perampasan kendaraan bermotor (begal motor) sebelum melakukan aksinya kadang mengkonsumsi obat daftar “G” untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dalam melakukan aksinya. Untuk itu kiranya penegak hukum memberikan sanksi pidana yang lebih berat terhadap kejahatan yang hampir mencakup seluruh negara di bumi ini.

Dalam kasus mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka putusan hakim Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Batu Licin dianggap kurang berat untuk pengedar obat daftar G jenis carnopen ini. Sehingga menurut pemikiran saya akan lebih baik menjerat pelaku tersebut menggunakan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.karena kejahatan tersebut dianggap terlalu merugikan manusia.Apabila mengkonsumsi obat-obatan tersebut dapat merusak kesehatan dan merusak generasi muda.

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian maka judul dalam penelitian ini yaitu: **“Analisis Putusan Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Batu Licin, Tentang Perkara Sediaan Farmasi Obat Daftar G Jenis Carnopen Yang Tidak Memiliki Ijin Ditinjau Dari Aspek Keadilan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Batu Licin tentang perkara mengedarkan sediaan farmasi obat daftar G jenis carnopen yang tidak memiliki ijin?
2. Bagaimana Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Batu Licin tentang perkara mengedarkan sediaan farmasi obat daftar G jenis carnopen yang tidak memiliki ijin di tinjau dari aspek keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hakim Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Batu Licin tentang perkara mengedarkan sediaan farmasi obat daftar G jenis carnopen yang tidak memiliki ijin
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Batu Licin tentang perkara mengedarkan sediaan farmasi obat daftar G jenis carnopen yang tidak memiliki ijin di tinjau dari aspek keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai wacana kajian untuk memberikan sumbangsih pemikiran tentang perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan peredaran obat-obatan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah Dan Penegak Hukum

Penulisan ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian atau pertimbangan bagi hakim dalam melakukan pengambilan putusan.

b) Bagi Masyarakat Umum

Penulisan ini menjadi kontribusi sebagai bahan bacaan yang bermanfaat dalam kerangka ilmu pengetahuan pemahaman dan guna meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan keadilan.

c) Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum, dan sebagai acuan agar nantinya penulis bisa lebih baik lagi dalam pengetahuan di bidang hukum.

E.Kegunaan Penelitian

1. Berguna bagi setiap hakim dalam menentukan dan melaksanakan pengambilan putusan,dan juga digunakan oleh hakim sebagai acuan dalam menetapkan putusan apakah telah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak.
2. Kegunaan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hokum,diharapkan dengan penulisan ini menghasilkan suatu pemikiran yang baru atau dapat membuat terobosan baru dalam bidang keilmuan yang pada

akhirnya akan berimplikasi ke arah pembentukan suatu peraturan system yang baru yang berguna bagi seluruh rakyat Indonesia dan dapat memenuhi cita-cita hukum dimasa yang akan datang.

F.Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, artinya penelitian hukum yang menjadi objek kajiannya meliputi asas-asas hukum, ketentuan perundang-undangan, serta berbagai literatur seperti teori negara hukum, teori keadilan dan serta teori-teori yang lain yang berhubungan dengan penulisan ini. Jadi secara yuridis analisis yuridis yang dilakukan dalam hal ini mengacu pada penerapan kaedah hukum, yang meliputi peraturan perundangan ditengah masyarakat, sedangkan normatif analisis yang dilakukan dalam ini adalah putusan hakim nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Batu Licin tentang perkara pengedaran sediaan farmasi obat daftar G jenis carnopen yang tidak memiliki ijin edar.

2. Jenis Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini terbagi atas dua yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Jenis bahan hukum primer adalah jenis data, dokumen tertulis, file informasi, atau pendapat yang diperoleh langsung dari sumber utama/pertama. Data primer dalam analisis ini

diperoleh dari putusan nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Batu Licin.

Dan Undang-Undang yang berkaitan dengan isi putusan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder di peroleh dari buku,jurnal, dan hasil penelitian terdahulu tentang analisis putusan hakim.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang- undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan dalam penelitian. Oleh karena itu, Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan- bahan pustaka yang ada kaitannya dengan putusan nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Batu Licin.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode meneliti suatu objek-objek dengan tujuan tujuan membuat deskriptif, gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki. Analisis bahan hukum ini tepat untuk menganalisa kasus peredaran obat-obatan terlarang dalam putusan.

G.Sistematika Penulisan

Laporan dari penulisan skripsi ini terdiri dari 4 Bab yang masing-masing terdiri dari beberapa subbab. Dibawah ini diuraikan tiap-tiap bab secara singkat.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan hukum, manfaat penulisan hukum, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan mengenai teori- teori dan definisi- definisi yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul, yaitu mengenai tinjauan tentang pidana dan kajian umum prosedur putusan hakim.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjabarkan hasil analisa tentang permasalahan yang ada yaitu mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Batu Licin tentang perkara mengedarkan sediaan farmasi obat daftar G jenis carnopen yang tidak memiliki ijin ditinjau dari aspek keadilan.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran oleh penulis.